

Politica, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2020

## STUDI GERAKAN IDEOLOGI PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2019

Oleh

Iswandi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [Iswandish239@gmail.com](mailto:Iswandish239@gmail.com)

### Asbtak

The ideology contestation is basically a classic polemic, where after independence the ideology of Islam was confronted with nationalism and took root until now (reform). However, the momentum of the 2019 election political contestation was again marked by the struggle of ideology namely ideology of Islamism and nationalism. The polemic began with the emergence of religious issues that were raised on the surface of political actors as a hegemony in taking the sympathy of voters. The existence of religion as a central issue began in 2016-2017 related to the prosecution of Ahok who insulted religious values (Islam), and among the political parties involved in the demonstrations namely PPP, PKS, PBB, and PKB. In that momentum the beginning of the revival of Islamic ideology as the power in defending Islamic sovereignty.

Judging from the ideology of political parties in Indonesia in the 2019 election political contestation, the ideology of political parties based on the statutes and bylaws (AD / ART) that the ideology applied can be classified into three parts namely ideology Nationalism, Islamism, and Nationalist-Religious, and the three ideologies. This can be proven based on the results of a survey from Australia 2017-2018 based on the voters. However, political parties based on multiple ideologies, PAN, PKB and Democrats, each have priority orientation. PAN and PKB tend to polarize the values of Islamism (religious), while Democrats are more dominated by nationalist issues.

The concept of Islamic political ideology, in the context of political contestation in political party elections, is basically a necessity to implement the values of *ri'ayah*, *taqwin*, *irshad* and *ta'dib* through political education, or campaign in elections to achieve mutual benefit, both parties whose ideology Islamism, nationalism and nationalist-religious, so as to build the moralistic side of society, and intelligence in responding to the issues that exist in the election apart from that, political parties in confronting political contestation the emphasis of the movement must reflect the value of poverty, the three ideologies have been packaged in the values of Pancasila in the third principles of Indonesian unity.

**Keywords:** *Political Parties, Political Party Ideology, 2019 Election Politics.*

### Asbtak

Kontestasi ideology pada dasarnya polemik klasik, dimana pasca kemerdekaan ideologi islam dihadapkan dengan nasionalisme dan mengakar sampai saat ini (reformasi). Akan tetapi momentum pemilu 2019 kontestasi politik kembali diwarnai pergulatan ideology yakni ideology islamisme dan nasionalisme. Polemik tersebut berawal dengan mencuatnya isu keagamaan yang dimunculkan dipermukaan pelaku politik sebagai hegemoni dalam mengambil simpati pemilih. Eksistensi agama sebagai sentral isu berawal tahun 2016-2017 terkait penuntutan terhadap Ahok yang melecehkan nilai-nilai agama (Islam), dan diantara partai politik yang terlibat dalam demonstrasi yakni PPP, PKS, PBB, dan PKB. Dalam momentum tersebut awal mencuatnya kembali ideologi Islam sebagai *of the power* dalam mempertahankan kedaulatan Islam.

Menilik ideologis partai politik di Indonesia pada konstestasi politik pemilu 2019, ideology partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) bahwa ideologi yang diterapkan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yakni ideology Nasionalisme, Islamisme, dan Nasionalis-Religius, dan ketiga ideology tersebut dapat dibuktikan dengan berdasarkan hasil survey dari asutralia 2017-2018 berdasarkan pemilih. Namun demikian partai politik yang berasaskan ideologi ganda, PAN, PKB dan Demokrat, masing-masing memiliki kiblat prioritas. PAN dan PKB condong polarisasi nilai-nilai Islamisme (religious), sedangkan Demokrat lebih didominasi oleh isu-isu nasionalis.

Konsep ideology politik Islam, dalam konteks kontestasi politik dalam pemilu partai politik pada dasarnya sebuah keharusan mengimplementasikan nilai-nilai *ri'ayah, taqwin, irsyad dan ta'dib* melalui pendidikan politik, ataupun kampanye dalam pemilu guna mencapai kemaslahatan bersama, baik partai yang berideologi Islamisme, nasionalisme dan nasionalis-religius, sehingga terbangun sisi moralistik masyarakat, dan kecerdasan dalam menanggapi isu-isu yang ada dalam pemilu. Selain dari itu partai politik dalam menghadapi konstestasi politik penekanan gerakannya harus mencerminkan nilai kemaslahatan, ketiga ideology tersebut telah kemas dalam nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga persatuan Indonesia.

**Kata Kunci:** *Partai Politik, Ideologi partai Politik, Politik Pemilu 2019.*

### Pendahuluan

Ideologi politik Islam adalah salah satu dinamika klasik yang mengakar sampai saat ini, dalam sejarah mulai dari orde lama (Orla), orde baru (Orba), dan reformasi, peran ideologi (Islamisme dan nasionalisme) telah menjadi isu tahunan dalam perembutan kekuasaan. Dimana masa orde lama yang motori oleh Soekarno yang menggagas tentang konsep nasionalisme, banyak kalangan Islam yang menentang salah satunya kelompok dari Darul Islam (DI). Masa Orde Baru, dikenal ada tiga system politik diimplementasikan yakni *corporate, hereatucratic outhoritarian*, dan *pluralistic*. Dengan system politik dalam Orba

tersebut salah satu langkah dalam memimalisir gerakan ideologi Islam. Salah satu langkah diambil oleh Soeharto pada saat itu membiarkan ideologi Islam masuk dalam ranah politik, dan beri dukungan oleh Hefner yang disebut sebagai Islam Rezimis. Dalam peran Islam masuk dalam lingkungan politik masa orde baru untuk memperoleh dukungan dari pihak umat Islam. Akan tetapi setelah lengsernya Soeharto dan digantikan oleh BJ. Habibie, Ideologi Islam pada masa transisi orde baru dan reformasi terjadi pro dan kontra karena menganggap bahwa demokrasi dalam definisi dalam prosedural barat berbeda dengan demokrasi dalam Islam. Sedangkan masa reformasi, ideologi politik Islam kembali, memanas karena dimotori etnis dan agama serta saat itu representasinya sangat tinggi, dengan munculnya kelompok-kelompok Islamis menuntut bahwa Indonesia harus berdasarkan syariah. Dalam artian bahwa Indonesia harus merubah wujud menjadi negara Islam.<sup>1</sup>

Transisi orde baru ke reformasi, partai politik salah satu instrumen pokok dalam pelaksanaan pemilihan umum eksekutif dan legislative sebagaimana dalam UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pelaksanaan Pemilu mayoritas kalangan berpendapat bahwa partai politik menjadi penujang keberhasilan demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Schattscheider "*political parties created demokrasi*" sehingga partai politik adalah pilar penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of isntitutionalization*) terhadap system demokratis. Bahkan dikatakan pula oleh Schattscheider "*modern democracy unthinkable save in terms of the parties*"<sup>2</sup> dengan demikian peran dan fungsi partai politik sangat fundamental dalam perkembangan demokrasi modern. Namun perjalanan partai politik sampai saat ini belum terlihat secara signifikan dalam menempatkan ideologi partai masing-masing pada saat kampanye dalam proses pemilihan umum.

Partai politik sebagai instrument pada pemilihan umum, sebagaimana bunyi UUD 1945 Pasal 6A Ayat 2 bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan atau direkomendasikan dari partai politik ataupun gabungan dari beberapa partai politik, dalam regulasi pengusulan seorang calon presiden dan wakil presiden pada undang-undang pemilihan umum dijelaskan bahwa dukungan berasal dari partai politik yang menjabat sebagai anggota DPR-RI ataupun suara nasional (presidential threshold) sebagaimana penetapan dalam system pemilihan umum. Dengan demikian, dalam pemilihan umum partai politik

---

<sup>1</sup> Kunawi Basyir, *Ideologi Politik Islam Di Indonesia*, Jurnal Al-Tahrir, Vol. 16, No. 2 (November 2016), hlm. 346-357

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 7 (PT. Grafindo Persada, Jakarta: 2005), hlm. 401

menjadi salah satu instrument yang fundamental dalam menentukan keberhasilan demokrasi dan kedewasaanberpolitik.

Namun demikian,problematika kepartaianterdapat pada sisi internal kepartaian dalam memuluskan kehendaknya untuk mempertahankan kekuasaan sehingga sikap pragmatisime politik ketemu pragmatisme ekonomi, sehingga lingkup kepartaian di indonesia hanya mengejar rented dan partai tidak bekerja sesuai dengan fungsi yang dituangkan dalam undang-undangpemilu. Hampir setiap literature menjelaskan bahwa partai politik adalah bagian dari penguatan demokrasi.systempolitik partai harus konstuptif dalam menciptkan demokrasi ini dengan baik dan melaksanakan peran dan fusingnya, sebab barometer dalam berdemokrasi dan kualitas konstestasi dalam pemilu ada pada kehendak partai politik.<sup>3</sup>

Salah satu contoh tentang kompetisi ideologi partai politik antara ideology partai islamisme Menurut laila kholid alfirdaus bahwa pemilihan umum (pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2016-2017) partai politik isu-isu yang tengah hangat melalui segmen keagamaan, dapat kita lihat bahwa partai yang berideologi islamisme diantaranya PKS, PPP, PBB dan PAN dalam demonstrasi dalam memperjuangkan nilai-nilai agama.<sup>4</sup>menguatnya ideologi antara islamisme dan nasionalisme saat tuntutan umat islam, ormas islam, partai politik (berideologi islam), yaitu dalam tuntutan terhadap ahok sebagai penista agama.

Selain itu, probelematika peran ideology partai mengakar sampai konstestasi politik pada pemilu 2019 yang lebih cenderung isu nasionalisme dan Islamisme dibenturkan dengan berbagai cara. Dengan benturan ideologi dalam gerakan politik terdapat dua aspek dalam pemilu 2019 yaitupertama, meningkatkan responsive dan partisipasi civil society dalam memberi dukungan penuh terhadap calon presiden dan wakil presiden. kedua, isu islamisme dan nasionalisme, hal tersebut berdampak negative karena banyaknya melahirkan hoax, perpecahan dan pragmatis serta egosentris masing-masing pendukung, sehingga nilai-nilai persatuan tidak terlihat.

Peran deologi pada pemilihan umum 2019 sangat terlihat, dengan munculnya agama sebagai isu sentral, pada pemilihan senrentak presiden dan wakil presiden. Munculnya isu tentang saling mengkafirkan, pancasila vs khilafah, islam radikal, dan larangan suara adzan terlalu keras setiap

---

<sup>3</sup> Teguh Imansyah, *Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik*, (Vol: 1 No. 3), Jurnal RechtsVinding 2012, hlm. 390

<sup>4</sup> Laila Kholid Alfirdaus, *Dari Identitas Ke Ideologi: Penguatan Arah Kebijakan Programatik Partai Politik*, (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 2 (2018), hlm. 103.

masjid.<sup>5</sup>Dengan indikasi tersebut bahwa keberadaan ideologi islamisme dan nasionalisme sangat menampakkan diri dalam setiap kampanye dilakukan. Dengan demikian, apabila ideologi setiap partai politik menjadi jargon egosentris masing-masing partai politik, maka dinamika ideologi akan menjadi bagaian dari probelematika setiap konstestasi pemilu akan datang.

## **PEMABAHASAN**

### **A. LEGALITAS PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM**

System demokrasi modern kedaulan rakyat adalah panglima dalam menentukan presiden dan wakil presiden dalam satu periode.Berbeda dengan sebelum masa orde baru, (parlementer), dimana pengangkatan presiden dan wakil presiden melalui suara perwakilan yaitu dari Majelis Perwakilan Rakyat (MPR).Namun setelah perubahan (Amanden UUD 1945) sistem pemilihan umum baik dari eksekutif dan legislative, kedua-kedua berdasarkan suara rakyat atau kehendak rakyat dalam menentukan wakilnya dalam pemerintahan.

Setelah perubahan (amandemen) UUD 1945, bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum partai politik menjadi jargon utama dalam mendelegasikan kandidat pemimpin masa depan. Dengan demikian dapat kita lihat pada UUD 1945 telah disebutkan pada pasal 6A nomor 2 bahwa “*pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”<sup>6</sup>.Oleh karena itu dapat disimpulkan bawah partai politik memiliki peranan sangat penting dalam penentuan pencalonan kepala negara.

Selain dari UUD 1945, dapat dilihat putusan mahkamah konstitusi Nomor.52/PUU-X/2012 setiap partai harus mengikuti tahapan verivikasi yang ketat untuk penyerderhanaan partai politik.Maka melalui putusan Mahkamah konstitusi, subtansinya bahwa setiap partai politik harus menunjukkan kualitas dan kuantitasnya sebagai salah satu tolak ukur membangun demokrasi, berdasarkan nilai-nilai pancasila.

Kedudukan partai politik memiliki peranan yang fundamental, dimana Presiden sebagai kepala negara (eksekutif) dewan perwakilan rakyat (DPR) (legislatif), keduanya tidak bisa melepaskan diri dan harus bertolak pada rekomendasi dari partai politk sebagai partai pengusung.<sup>7</sup>Namun demikian selain partai pengusung, setiap partai memilikitanggung membangun kedewasaan

---

<sup>5</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47797158>

<sup>6</sup> Lihat UUD 1945

<sup>7</sup> Lihat UU Nomor 2 Tentang Partai Politik

masyarakat dalam berpolitik, dan membangun *social politics* yang efektif dilingkungan masyarakat, bukan malah sebaliknya. Membangun *social politics*, tentunya aspek pendukungnya melalui *political education* dengan tujuan yakni mempersiapkan masyarakat menghadapi siklus perpolitikan dalam kontestasi pemilu.

Partai politik melalui *political education* adalah hal yang iktual dalam system berdemokrasi, sehingga tugas dan fungsi partai politik adalah sebuah kewajiban dalam merealisasikan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, pada pasal 31.<sup>8</sup> yaitu

1. *Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain: a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.*
2. *Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.*

Dengan demikian, terkait dengan partai politik mengembalikan substansi sebagaimana dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, memberikan pendidikan politik sesuai dengan konteks keindonesiaan. Sehingga berkehidupan berbangsa bernegara tercipta melalui pemahaman politik yang mumpuni. Dengan istiqamah pendidikan politik bisa artikan usaha yang sistematis dalam menstransformasikan segala sesuatu dengan partai politik agar peran dan fungsi tercipta sebagai salah satu instrument pemilu.<sup>9</sup> terciptanya pendidikan politik efektif maka orientasi pemilu dalam melahirkan perwakilan pemerintahan tidak menjadi polemik yang berkepanjangan karena ujung tombak negara lahir pada kontestasi pemilu dalam lima tahun sekali.

## **B. IDEOLOGI PARTAI POLITIK BERDASARKAN PEMILIH**

Dalam system kepartaian sangat urjent mereka menitik beratkan ideologi partai mereka, agar arah dan tujuannya jelas. Perspektif ideologi yang berkembang di eropa ada dua ideologi yaitu kaum nasionalis dan kaum islamisme, dan setiap

---

<sup>8</sup> Lihat UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

<sup>9</sup> Mustiqowati Ummul Fithriyyah, *Revitalisasi Partai Politik Dalam Penegakan Negara Demokrasi Di Indonesia*, hlm. 28

hal tersebut dipresentasikan masing-masing partai yang memiliki ideologi sesuai dengan konsep kepartainnya. perbedaan ideologi setiap partai politik dalam system demokrasi tersebut bukan problematic mendasar untuk dipermasalahakan, karena dalam landasan negara telah disebutkan dan diuraikan sesuai dengan konteks system kenegaraan.

Pemilihan umum 2019, ada empat belas partai yang berpartisipasi dalam pemilu berbeda dengan setelah runtuhnya rezim orde baru. Klasifikasi partai politik yang memiliki terkait dengan ideologi masing-masing partai yaitu:

#### **IDEOLOGI PARTAI POLITIK INDONESIA**

<b>NO</b>	<b>NASIONALISME</b>	<b>ISLAMISME</b>	<b>DUALISME</b>
1	PDIP	PPP	DEMOKRAT
2	GOLKAR	PBB	PKB
3	NASDEM	PKS	PAN
4	PERINDO		
5	BERKARYA		
6	GERINDRA		
7	PSI		
8	HANURA		

Ideologi partai politik, berdasarkan hasil survey tahun 2017-2018 dari Lembaga Survey Indonesia (LSI) dan yang bekerjasama dengan lembaga survey dari Australia Australian National University (ANU), bahwa peran ideologi partai sangat berpengaruh terhadap pemilih. Survey yang dilakukan bahwa berdasarkan pemilih, hal tersebut menunjukkan bahwa yang terdapat tiga aspek yaitu nasionalisme, islamisme, dan ideologi ganda, namun yang mendominasi pemilih terbanyak masih dipegang oleh partai politik yang berideologi nasionalisme.<sup>10</sup> Ideologi partai politik sangat berpengaruh terhadap pemilih, sebab ideologi menjadi ciri khas setiap partai politik dalam setiap gerakan politik dalam kontestasi pemilu. Ideologi partai politik adalah dasar suatu yang fundamental oleh karenanya ideologi tersebut sebagai ciri khas partai politik dalam merealisasikan tujuan-tujuan politiknya.

#### **C. GERAKAN *COMPAGN* PARTAI POLITIK PEMILU 2019**

Pemilihan umum tahun 2019, yudikatif dan legislative secara serentak dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum pertama dalam sejarah pemilu di Indonesia. Namun dalam periodisasi pemilu 2019 terdapat 14 partai politik yang

---

<sup>10</sup><https://tirto.id/corak-ideologi-partai-partai-di-indonesia-cJKc>

mengikuti konstestasi politik yang dilaksanakan selama sekali dalam lima tahun (1-periode), sedangkan dalam refresentasi partai poliltik terbagi menjadi dua kelompok dalam memberikan dukungan masing-masing calon, dan dapat dilihat tabel dibawah koalisi partai politik pada pemilu 2019 berserta ideology partai masing-masing.<sup>11</sup>

### 1. Koalisi parpol pemilu serentak 2019 dan ideologi partai politik

No	Koalisi 01	IDEOLOGI	Koalisi 02	IDEOLOGI
1	PDIP	Nasinalisme	GERINDRA	Nasionalime
2	GOLKAR	Nasionalisme	PAN	Nasionalisme & Religius
3	PPP	Islamisme	PKS	Islamisme
4	PKB	Nasionalisme & Religius	BERKARYA	Nasionalisme
5	PBB	Islamisme	DEMOKRAT	Nasionalisme & Religius
6	HANURA	Nationalisme		
7	NASDEM	Nasionalisme		
8	PSI	Nasionalisme		
9	PERINDO	Nasionalisme		

Menilik jumlah partai politik Pemilihan umum serentak 2019 yang berpartisipasi bahwa nilai refersentasi dari partisipasi pemilihan dalam memilih presiden dan wakil presiden mencapai sekitar 80.99% hal tersebut melampaui dari target komisi pemilihan umum yang memperkirakan partisipasi pemilih hanya sekitar 77,05%, bahwa hal ini menandakan dalam kontestasi pemilu serentak berdampak positif dalam pemilihan-pemilihan sebelumnya, jika ditinjau dari sisi partisipasi.<sup>12</sup> Meningkat partisipasi dalam pemilihan umum bahwa perhatian masyarakat terhadap masa depan negara bernilai positif karena dalam melaksanakan amanat kedaulatan berada pada warga negara (citizen).

Meningkatnya jumlah pemilih pada pemilu 2019 mencapai angka 80,99%, nilai refresentasi dari partisipasi masyarakat dalam kontestasi politik dapat

<sup>11</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/17/13333761/ini-14-partai-politik-peserta-pemilu-2019>

<sup>12</sup> <https://wartakota.tribunnews.com/2019/04/18/partisipasi-pemilih-pemilu-2019-tembus-8090-persen-jauh-lampaui-target-kpu-775-persen>



dikatakan memiliki dampak positif terhadap kepekaan dalam menggunakan hak suara mereka. Namun demikian. Pemilihan umum 2019 tersebut memuat dampak negative dengan melegitimasi agama sebagai isu politik dan juga munculnya pemberitaan bohong, isu sara dll. kontestasi politik ini sangat esensial perpecahan yang terjadi. Sehingga sangat terlihat bahwa moralitas seseorang ataupun kelompok dikesampingkan, dan terlihat bahwa pasca pemilihan umum 2019 sebagian besar krisis moral dalam berpolitik.

## **2. Isu agama sebagai sentral pemilu 2019**

Polemik kontestasi politik pemilu 2019, tengah mencuatnya isu agama sebagai pokok sentral sebagai isu menimbulkan dimanakan berkempanjangan, sehingga mengakar sampai seluruh pelosok. Menguatnya isu agama yang disandikan keberadaan nasionalisme sehingga berakibat kebencian terhadap sesama pemeluk agama ataupun antara kelompok. Hasanuddin Ali (Ceo Alvara Reseach Center), menjelaskan pemilu 2019 berpotensi mengedepankan agama sebagai sentral dalam memenangkan hati pemilih.<sup>13</sup> Selain isu keagamaan dalam pemilu 2019, isu nasionalisme dan komunisme juga muncul sebagai rival politik.<sup>14</sup> Kedudukan ketiga isu agama (islam), nasionalisme, dan sosialisme (komunis) telah menjadi tradisi setiap pemilihan dan peran ideology tersebut masa lalu (klasik) mengakar sampai saat ini.

Menurut Syamsuddin Haris Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Berdasarkan hasil survei nasional dari LIPI, beber Syamsuddin, sebanyak 54,2% responden tidak sepakat bila isu agama dipakai dalam politik dan 32,9% setuju isu agama digunakan dalam pemilu.<sup>15</sup> dengan demikian, berdasarkan hasil survey LIPI bahwa mayoritas masyarakat tidak menginginkan agama sebagai isu politik praktis dalam pemilu 2019, karena dapat menimbulkan kebencian antara rakyat ataupun umat beragama itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan agama harus dapat ditempatkan sebagai pemersatu seluruh umat, bukan sebagai alat pemecah belah antara dengan lainnya.

Gerakan ideology politik antara islamisme, nasionalisme serta komunisme, adalah manifestasi gerakan politik klasik yang mengakar sampai saat ini, dimana soekarno sebelum kemerdekaan menginginkan negara bercirikan sekulerisme sedangkan pihak cendekiawan islam menginginkan Indonesia sebagai negara islam. pertentangan ideology tersebut masih menjadi polemik sampai era reformasi dimana sebagian umat islam menuntut bahwa Indonesia harus

---

<sup>13</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/23/22310771/politisasi-agama-dinilai-tetap-akan-dimainkan-di-pemilu-2019>

<sup>14</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42340266>

<sup>15</sup> <https://mediaindonesia.com/read/detail/256086-isu-agama-melempem-di-pemilu-2019>

berasaskan syariat islam. namun tujuan mendirikan negara Indonesia sebagai negara islam hal itu menjadi dinamika karena bertentangan dengan dengan asas-asas dan dasar negara negara yang ada. Akan tetapi, Perkembangan masa kemasa, dalam proses pemilu isu agama, nasionalis, dan komunis dalam kontestasi perpolitikan pada pemilu malah menjadi *market of identity* para politisi untuk melihat reaksi dan aksi masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu khususnya komoditi islam, dan setiap gerakan politik tersebut sebagai besar partai politik tidak bisa melepaskan dari dari isu-isu keagamaan dan nasionalis, apalagi tentang komunismi.

#### **D. IDEOLOGI PARTAI POLITIK PEMILU 2019**

Ideologi partai politik dalam sistem kepartaian di Indonesia tidak ada larangan secara mutlak, karena dalam perundang-undangan tidak ada norma yang mengatur terkait dengan ideology partai politik. tapi menelusuri ideology dapat dilihat pada AD/ART masing-masing pertain politik lalu dilihat kecenderungan politiknya. Ideology partai politik di Indonesia berdasarkan tolak ukur AD/ART beragam jenis, terdapat partai politik menggunakan ideology nasionalisme, islamisme, dan nasionalis-religius, di antara Ketiga ideology partai ini mencerminkan ciri khas dalam gerakan politiknya kontestasi politik pada pemilu.

Namun terlepas dari itu sebagai Partai politik apabila berpandangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 NRI, berbicara tentang ideology islam ataupun nasionalisme hal itu bukan menjadi permasalahan pokok, karena kedua ideology tersebut tidak unsur penekatanan bahwa ideology tersebut tidak diperbolehkan. Akan tetapi dalam kontestasi politik maka setiap partai politik walaupun berbeda ideology tapi negarakan harus sesuai dengan syiar-syiar pancasila dan bagaimana harapan pancasila dalam untuk membentuk negara republic Indonesia untuk kedepannya.

Ideologi partai politik adalah suatu aspek yang fundamental dalam menentukan arah dan tujuan perpolitikan setiap partai politik yang memiliki legal standing untuk mengikuti kontestasi pemilu 2019. Karena ideology salah satu corak dan ciri khas atau jalan dalam meyakinkan setiap partisipasi masyarakat guna mengikuti atau memberikan hak suaranya pada pemilu. oleh karena itu penulis mengklaster ideology partai politik di indonesia terdapat tiga kelompok yakni:

1. **Ideologi Nasionalisme**, ideology sebuah partai politik salah tujuan menunjukkan karakteristik, dalam membangun gerakan politik baik sebagai peserta pemilu ataupun melakukan pendidikan politik terhadap warga negara. Menurut Yordan yang menjabat sebagai sekretaris PDI Jawa timur menjelaskan bahwa ide-ide politik dan pola gerakan serta pemikiran

berdasarkan sudut pandang dari soekarno yaitu marhaenisme, sebagaimana narasinya yakni, pertama nasionalisme, ide tersebut tidak ada pengecualian antara suku, etnis dan agama masyarakat yang terabaikan antara dengan yang lainnya, oleh karena itu ideologi nasionalisme (pancasila) berlaku secara universal untuk membangun SDM dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, yaitu berbicara tentang ekonomi serta mutu sosial dalam mencapai keadilan yang merata.<sup>16</sup>

2. **Ideologi Islamisme**, Dalam perjalanan Partai keadilan sosial sejak tahun 1999-2019, bahwa setiap gerakan politik yang dipraktekkan berdasarkan konsep tarbiyah sebagaimana dalam gagasan pemikiran dari Muhammad natsir dan gerakan ihwanul muslimin. Dalam internal PKS melalui sikap politiknya yang transformasi fundamentalis islam menunjukkan pola penggabungan antara gagasan pendidikan politik dan gagasan Muhammad natsir dan ihwanul muslimin. Oleh karena dalam gagasan islamime fundamentalis menjadi pokok ciri khas sebagai partai politik.<sup>17</sup>

Partai politik Islam, pada dasarnya ideologi tersebut adalah sebuah norma, doktrin dan kepercayaan yang bersumber dari ajaran al-Quran dan hadits memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang madani, yang makmur, adil, demokratis sejahtera dan bermartabat. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP dan PKS.<sup>18</sup> Maka diantara ideologi dalam kepartaian tersebut indonesia pada dasarnya memiliki kedudukan dan tujuan yang sama untuk membangun demokrasi, melalui gerakan-gerakan politik. Teori ideologi dari Roy C. Macrides yang dikutip oleh A. Bakir Ihsan bahwa ideologi tersebut bukan hanya sekedar doktrin, norma, kepercayaan, akan tetapi sebagai bentuk perilaku dan sikap untuk menunjukkan kekhasan setiap partai politik yang diimplementasikan secara konsisten.<sup>19</sup>

3. **Ideologi Nasionalisme dan Regeligius**, selain ideologi islamisme dan nasionalisme ada beberapa partai politik yang berideologi ganda yaitu penggabungan antara nasionalisme dan islami, ideologi tersebut dapat dilacak melalui regulasi dari internal masing-masing partai politik (AD/ART). Diantara partai politik yang menerapkan ideologi ganda yaitu

---

<sup>16</sup> Galang Geraldi, *Ideologi dan Partai politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Pundamentalisme di PKS*, Jurnal Politik Vol. 2 No. 2, (Desember 2019), hlm. 141

<sup>17</sup> Ibid., 153

<sup>18</sup> A. Bakir Ihsan, *Corak Ideologis Partai Politik Islam*, Jurnal Review Politik Vol. 07 No. 1 (juni 2017), hlm. 9

<sup>19</sup> Ibid.,

Demokrat sebagaimana dalam AD/ARTnya dijelaskan pada “*Pasal 3 tentang Ideologi partai adalah Nasionalisme-Religius, yaitu kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan agama serta memperhatikan aspek nasionalisme, humanisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.*”<sup>20</sup> Dalam ideology ganda (nasionalisme dan relegius) salah satu gerakan guna menghimpun pemilih yang berjiwa nasionalisme serta islamisme atau dikategorikan islam fundamental, sehingga setiap gerakan politik sistuasional.

Gerakan politik partai yang berideologi nasionalisme dan religius, safari politik mereka tempuh yakni kampanye-kampanye melalui pondok-pondok pesantren. Disini bisa dilihat bahwa ideology dapat menentukan arah perpolitikan partai dalam menentukan objek pendidikan politik.<sup>21</sup> Ketiga ideology nasionalisme dan islamisme, dapat kita klasifikasikan bahwa keduanya memiliki kecenderungan dalam berpolitik, misalnya nasionalisme, memiliki pola yang lebih sekularis yang diperankan oleh PDI, GOLKAR, GERINDRA, partai ideology islamisme focus pada perjuangannya nilai-nilai keagamaan (islam) yang motori oleh partai PBB, PPP, dan PKS. Sedangkan berideologi ganda (nasionalisme dan religius) PAN, PKB, dan Demokrat, mereka memiliki kecenderungan dalam isu politiknya. Misalnya PAN dan PKB kecenderungan gerakan politiknya kedua partai tersebut lebih menitikberatkan isu-isu tentang keagamaan (islam) walaupun kedua partai tersebut berideologi ganda. Sedangkan Demokrat, kecenderungan dalam implementasi politik pada pemilu lebih nampak pada konsep nasionalisme. Maka ketiga partai yang memiliki ideology ganda tersebut memiliki kecenderungan khusus masing-masing partainya.

Menurut Glock, bahwa ideologysangat signifikan apabila terjadi perubahan siklus sosial, ideology akan menjadi sebuah visi, dan menjadi ilustrasi sarana pokok untuk mencapainya, oleh karena dapat kita ketahui bahwa ideology tersebut adalah sebuah instrument perubahan. Sedangkan kaum kiri, namun teori tentang perubahan sosial, sebuah ideology memiliki peranan penting dan menjadi pijakan baik kelompok maupun individu, sebagaimana disampaikan oleh Feuebach dan marx, bahwa memberikan gambaran ideology akan meneguhkan manusia.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Lihat AD/ART Partai Demokrat

<sup>21</sup><https://www.merdeka.com/politik/punya-dua-ideologi-demokrat-optimis-perolehan-suara-meningkat.html>

<sup>22</sup>David C. Leege, Lyman A. Kelletedt, Agama Dalam Politik Amerika, Ahli Bahasa Debbie A. Lubis, (Yayasan Obor Indonesia & Freedom Institute, Jakarta; 2006), hlm. 25

Sedangkan menurut Yebi Ma'asan Mayrudin mengidentifikasi partai politik berdasarkan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing partai politik dan hasil penelesurannya terdapat tiga varian ideologi partai politik yakni nasionalisme, islamisme, dan nasionalisme religious. Dalam klaster tersebut terkait dengan ideologi partai politik banyak terjadi pergeseran diantaranya ideologi nasionalisme, dan islamime, sedangkan partai yang berideologi ganda tidak mengalami pergeseran sama sekali dan pola gerakannya masih stagnan.<sup>23</sup> Dengan demikian, ideology sebuah partai politik dapat dikatakan adalah norma dan doktrin yang fundamental, dan Ideology partai adalah salah satu orientasi dan visi politik sebagai dasar tolak ukur perjuangan yang memiliki nilai-nilai idealism dalam melihat relaitas. Ideology tersebut sebagai konsep dasar yang ideal yang memiliki sifat formal dan universal dan menjadi identitas yang melekat setiap pola gerakan perpolitikan kontestasi pemilu atau setelah pemilu.<sup>24</sup>

#### **E. DINAMIKA PEMILU 2019 BERDASARKAN IDEOLOGI PARTAI POLITIK**

Fenomana pemilihan umum perodesasi 2019, agama menjadi sentral sebagai isu nasional dan dibenturkan dengan isu nasionalisme, dimana diksi-diksi agama menjadi instrument para politisi dalam mencari dukungan. Dalam isu agama mengalami mengalami problematic yang seharusnya tidak terjadi pada proses kampanye setiap partai pengusung pasangan calon. Proses kampanye yang berlangsung selama tujuh bulan, seruang isu agama dan nasionalisme dimana-mana, menimbulkan polemik berkempanjangan salah satunya pancasila dan khilafah, dan mengkafirkan dengan pemeluk agama lainnya, serta umat islam sendiri saling mengkafirkan sesama islam. pemilu tahun 2019 masih menunjukkan politik aliran

Menurut Abdul halim, agama dan politik harus saling mengisi tidak saling menpropokasi, sehingga nilai-nilai agama dapat menuntun perilaku dan kebijakan dalam berpolitik. Dengan demikian dalam konteks keindonesian melaksanakan proses pemilihan umum setiap elit partai atau partai politik, agama harus dipahami secara sumbansialis sebagai pengambil kebijakan dan penuntun dalam

---

<sup>23</sup> Yebi Ma'asan Mayrudin, *Dinamika Partai Politik Dan Positioning Ideologi: Studi Tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-partai Politik Peserta Pemilu 2014*, Jurnal Of Governence, Vol. 2 No. 2, (Desember 2017), hlm. 173-175.

<sup>24</sup> Iman Yudi Prasetya, *Pergeseran ideology dalam Partai Politik*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 (2011), hlm. 35

pelaksanaan proses berpolitik. Sehingga nilai-nilai moralistic nampak dalam berlangsungkan perpolitikan.<sup>25</sup>

Dengan demikian, pelaksanaan pemilihan umum adalah suatu bentuk manifestasi kepentingan negara, sehingga dengan itu negara sebagai bentuk kerjasama sosial untuk mencapai kemestiaan. Sehingga tujuan manusia mempaccapai kebahagiaan materil dan spiritual. Jadi dalam partai politik peserta kontestasi pemilu, harus mempererat persaudaraan sesama umat di indonesia bukan malah memecah belah. Sebagaimana dalam pandangan al-mawardi dan ibn. Taimiyah penjelasan tersebut sama yang dijelaskan qamaruddin khan, bahwa kepentingan umat islam hanyalah mempersatukan umat manusia dan menciptakan masyarakat besar berdasarkan keyakinan dan hukum yang sama, sebuah tata sosial berdasarkan prinsip-prinsip ilahi yang kekal dan universal.<sup>26</sup> Bahwa dengan ungkapan dari tokoh tersebut partai politik sebagaimana dalam hak dan kewajibannya sebagai istitusi dalam masa depan negara, harus mampu mempersatukan umat yang taat dengan hukum yang sama dianut dalam sitsem kenegaraan kita.

Indonesia sebagai negara yang berideologi pancasila, sebagaimana fungsi dan kedudukan sebuah ideology dikemukakan oleh Nur Sayyid Santoso Kristeva diantaranya;<sup>27</sup>

1. Ideology sebagai fungsi etis, setiap partai politik dalam gerakan politik praktis harus menunjukkan sikap dan perilaku terait dengan isu-isu yang dapat mengakitakan kegaduhan dan perpecahan masyarakat, sehingga sistem demokrasi dan citata bangsa negara dalam berdemokrasi tercapai.
2. Ideologi Sebagai fungsi Integrasi, nilai-nilai integrasi partai politik menjadi sebuah pengikat terhadap internal partainya dalam membangun demokrasi berdasarkan cita-cita pancasila
3. Ideology sebagai fungsi kritis, bahwa partai politik bisa menjadi salah satu sarana untuk melakukan kritik dengan keadaan tertentu guna membangun pradaban bangsa Indonesia.

Dengan demikian, ada tiga tahapan dimensi ideologi yaitu, realitas, idealisme, dan fleksibelitas, ketiga dimensi tersebut tergolong penting karena

---

<sup>25</sup> H. Abdul Halim, *Relasi Islam Politik & Kekuasaan*, (PT. Lkis Printing Cemerlang, Yogyakarta: 2013), hlm. 47

<sup>26</sup> Sukron kamil, *Pemikiran politik Islam tematik*, (Kencana, Jakarta: 2013), hlm. 27

<sup>27</sup> Nur Sayyid Santoso, *Kristeva, Sejarah Ideologi Dunia "Kapitalisme, Sosialisme, Kumunisme, Anarkisme, Anarkisme-Marxisme, Konservatisme*, (Lentera Kresindo, Yogyakarta: 2015), hlm. 12

ideology mengarahkan partai politik melihat realitas perkembangan siklus perpolitikan, sehingga idealisme setiap partai harus menjadi pegangan, namun demikian ideology harus memiliki kedudukan fleksible dalam situasi dan kondisi, dimensi ini bukan hanya sebagai kemampuan ideology dalam meneropong perubahan atas pembaharuan masyarakat akan tetapi setiap partai politik harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan.<sup>28</sup> Partai politik yang berangkat berdasarkan norma ideology masing-masing, maka partai politik baik dari partai berideology islamisme dan nasionalisme, harus memiliki dimensi fleksibelitas dalam melihat realitas saat ini.

#### F. IDEOLOGI ISLAM: KONTESTASI POLITIK PEMILU 2019

Pergulatan politik praktis, kontestasi pemilu 2019 bahwa partai politik, setiap gerakan politiknya salah satu nilai titik tolaknya yakni, setiap partai politik harus memelihara (*ri'ayah*) hubungan emosional, sikap dan perilaku masyarakat melalui pendidikan politiknya. Maka partai politik memiliki tujuan *taqwin*, *irsyad*, dan *ta'dib* masyarakat dalam membangun peradaban demokrasi Indonesia. Dengan demikian melalui ideology partai politik, baik ideology nasionalisme, islamisme dan nasionalis-religius, semestinya mengedepankan pendidikan moral politik agar perpecahan dan konflik mempertahankan ideology tidak terjadi. Dalam teori politik itu sendiri adalah salah satu metode atau jalan dalam mengatasi dan mengurus seperangkat problematik pada pemahaman masyarakat dalam maraknya politik negatif, dengan tujuan menciptakan kemashalahan dan keadilan umum.<sup>29</sup>

Terkait dengan ideology politik islam Menurut Ibn Khaldun, setiap manusia baik individu ataupun kelompok (Parpol) harus memiliki kekuatan moral yang didasarkan pada akhlak dan agama, karena manusia memiliki dua faktor mendasar yaitu nilai-nilai kebaikan dan kejahatan, sehingga kekuasaan dan politik harus berpegang terhadap nilai-nilai moralistic. Oleh karena kekuatan politik dan kekuasaan memiliki tujuan dalam melindungi rakyat, dan memelihara kemaslahatan bersama dalam melaksanakan politik.<sup>30</sup> Ibnu Tamiyah menjelaskan prinsip politik islam bahwa setiap pemimpin merealisasikan amanah kepada rakyat yang berhak mendapatkan perlakuan yang adil berbagai masalah yang terjadi, karena dalam politik bangunan kebijaksanaan politik yang adil dan baik yang diharapkan.<sup>31</sup> Selain itu, Ibnu Tamiyah menekankan dengan tegas bahwa

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.15

<sup>29</sup> H. Adbul Halim, *Relasi Islam Politik & Kekuasaan*, hlm. 24

<sup>30</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta; 1994), hlm. 179.

<sup>31</sup> Sirojuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam "Sejarah, Praktik dan Gagasan*, (PT. RajaGrafindo Persada, Depok; 2018), hlm. 275.

politik harus berlandaskan syariah karena fenomena yang ditemui terjadi kemerosotan moralitas. Menurut kualitas moral terjadi kerusakan para politisi satu sisi, dan disisi lain terkait dengan perekrutan kader partai politik. Oleh karena itu Ibnu tamiyah hadir untuk mereformasi sistem politik yaitu kembali keajaran-ajaran al-Quran dan Sunnah.<sup>32</sup>

Partai politik sebagai subjek terhadap masyarakat, maka sebelum dan setelah masyarakat sudah selayaknya mereka mendapatkan pendidikan politik, sehingga masyarakat tidak termakan dan tergiur oleh manifestasi hoax.<sup>33</sup> Sebagaimana Ibnu tamiyah dan Ibnu khaldun, menegaskan bahwa setiap warga negara (rakyat) harus mendapatkan perlakuan yang adil serta perlindungan. Gagasan kedua tokoh tersebut dalam konteks keindonesian, masyarakat secara umum sudah selayaknya mendapatkan pendidikan politik dari partai politik sesuai dengan bidang-bidang peran serta ideologis masing-masing. Pendidikan politik tidak lain membangun wawasan intelektual, membentuk kepribadian (karakter), mental, moralitas, tujuan dan capaian politik itu sendiri, dengan tujuan bahwa dalam kontestasi politik selanjutnya terjadi politik yang sehat.

Dengan demikian, politik Islam menjunjung tinggi moralitas adalah salah satu kewajiban yang absolut, dengan menerapkan etika moral yang diperintahkan Islam. Politik dalam Islam bahwa berorientasi dengan berinteraksi terhadap kelompok sosial melalui ketaqwaan, memperbaiki kondisi sosial, dan membangun kerja sama dengan rakyat umum, sehingga intisari dari politik harus membangun kemudharatan untuk khalayak umum dan terciptanya etika dalam berpolitik. Moral politik menjadi ciri dalam politik Islam dalam menciptakan kemudharatan, karena moral menjadi batasan setiap manusia dalam melaksanakan politik, sehingga tidak mencederai kultur sosial masyarakat antara hubungan antara kelompok dan individu.

Gerakan politik berdasarkan ideology bukan sebuah persoalan serius, akan tetapi dengan beragamnya ideology partai politik (nasionalisme, Islamisme, dan nasionalisme dan religius) adalah sebuah warna dalam membangun peradaban demokrasi Indonesia. Membangun demokrasi dan kekuatan intelektual politik masyarakat tidak terlepas dari gerakan partai politik melalui pendidikan politik sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik. Oleh karena itu, partai politik salah satu instrument demokrasi, sehingga partai politik dalam mengaplikasikan ideologinya baik dalam

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> Adelia Fitri, *Dinamika dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 1 (Agustus 2018), hlm. 125.



kampanye pemilu atau pendidikan politik, setiap gerakan politik harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila telah mengapit kedua ideologis tersebut yang dimiliki oleh partai politik.

## SIMPULAN

Peran partai politik di Indonesia memiliki kedudukan dalam menciptakan keberhasilan demokrasi, karena dapat dalam konstitusi Indonesia dan undang-undang partai politik begitupun dengan undang-undang pemilu, bahwa partai politik adalah instrumen yang fundamental. Karena dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta dengan pemilihan dewan perwakilan rakyat, harus melalui kehendak partai politik dalam artian berdasarkan rekomendasi dari partai politik ataupun gabungan (khusus eksekutif). Namun pasca pemilihan umum 2019, konstestasi politik telah diwarnai dengan pertarungan politik ideologis yakni ideologis islamisme dan nasionalisme dengan mencuatnya isu agama dan nasionalis dipermukaan.

Konstestasi politik pemilu 2019 dengan politik berlebelkan agama, maka dapat disimpulkan bahwa pemilu telah terhegemoni dengan isu tersebut sehingga melaharkan kefanatikan dan kebencian, sehingga dalam nuansa konstestasi pemilu dapat dikatakan telah terjadi krisis moral. Krisis moral terjadi karena nilai-nilai masing-masing kefanatikan ideology partai sehingga pertarungan mengakar sebagai doktrin tidak terhindarkan. Dengan demikian problematic terhadap ideologi setiap partai telah melampaui batas dalam proses perpolitikan di Indonesia pada pemilu tahun ini, sehingga agama dilegitimasi keranah politik praktis, sehingga menimbulkan polemic baik dari kalangan elit, ulama, ustadz, dan masyarakat terkait dengan penyebaran isu bercorak agama. Legitimasi agama dalam kampanye kemenangan isupancasila dan khilafah menjadi polemik serta saling mengakafirkan dengan tuduhan PKI dan Islam Radikal, sehingga masyarakat kehilangan moral dalam merespon isu tersebut. Kefanatikan dan krisis moral dalam merespon isu dalam pemilu, salah satu penyebabnya adalah minimnya pendidikan politik dari partai politik, pada hal dalam undang-undang partai politik melakukan pendidikan politik sampai ke pelosok-pelosok.

Oleh karena itu, kedudukan ideologi partai politik di Indonesia berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), bahwa dalam menghadapi konstestasi politik dalam pemilu akan datang, menyarankan untuk diteliti, bagaimana seharusnya fungsi ideologi partai politik menghadapi konstestasi politik, pertarungan ideologi melalui isu agama tidak terulang kembali.

## REFRSENSI

- Kellestedt, David C. Legee, Lyman, (2006). *Agama Dalam Politik Amerika*, Ahli Bahasa Debbie A. Lubis, Yayasan Obor Indonesia & Freedom Institute, Jakarta.
- Aly, Sirojuddin Aly, (2018) *Pemikiran Politik Islam “Sejarah, Praktik dan Gagasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Alfirdaus, Laila Kholid Alfirdaus, (2018). *Dari Identitas Ke Ideologi: Penguatan Arah Kebijakan Programatik Partai Politik*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 2.
- Asshiddiqie, Jimly, (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Basyir, Kunawi, (2016). *Ideologi Politik Islam Di Indonesia*, Jurnal Al-Tahrir, Vol. 16, No. 2.
- Fitriyyah, Mustiqowati Ummul, *Revitalisasi Partai Politik Dalam Penegakan Negara Demokrasi Di Indonesia*.
- Fitri, Adelia, (2018). *Dinamika dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 1.
- Geraldi, Galang, (2019). *Ideologi dan Partai politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Pundamentalisme di PKS*, Jurnal Politik Vol. 2 No. 2.
- Halim, H. Abdul, (2013). *Relasi Islam Politik & Kekuasaan*, (PT. Lkis Printing Cemerlang, Yogyakarta.
- Ihsan, A. Bakir, (2017) *Corak Ideologis Partai Politik Islam*, Jurnal Review Politik Vol. 07 No. 1.
- Imansyah, Teguh, (2012). *Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik*, Jurnal RechtsVinding Vol. 1 No. 3
- Kamil, Sukron, (2013). *Pemikiran politik Islam tematik*, Kencana, Jakarta.
- Mayrudun, Yebi Ma’asan Mayrudin, (2017). *Dinamika Partai Politik Dan Positioning Ideologi: Studi Tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-partai Politik Peserta Pemilu 2014*, Jurnal Of Governence, Vol. 2 No. 2.
- Kristeva, Nur Sayyid Santoso, (2015). *Sejarah Ideologi Dunia “Kapitalisme, Sosialisme, Kumunisme, Anarkisme, Anarkisme-Marxisme, Konservatisme*, Lentera Kresindo, Yogyakarta.
- Pulungan, J. Suyuthi Pulungan, (1994). *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prasetya, Iman Yudi, (2011). *Pergeseran ideology dalam Partai Politik*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 1 No. 1.

## UUNDANG-UNDANG

Lihat UUD 1945

Lihat UU Nomor 2 Tentang Partai Politik

Lihat UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Lihat AD/ART Partai Demokrat

**SUMBER INTERNET**

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47797158>

<https://www.merdeka.com/politik/punya-dua-ideologi-demokrat-optimis-perolehan-suara-meningkat.html>

<https://tirto.id/corak-ideologi-partai-partai-di-indonesia-cJKc>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/17/13333761/ini-14-partai-politik-peserta-pemilu-2019>

<https://wartakota.tribunnews.com/2019/04/18/partisipasi-pemilih-pemilu-2019-tembus-8090-persen-jauh-lampau-target-kpu-775-persen>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/23/22310771/politisasi-agama-dinilai-tetap-akan-dimainkan-di-pemilu-2019>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42340266>

<https://mediaindonesia.com/read/detail/256086-isu-agama-melempem-di-pemilu-2019>